CATRA

MENGAYOMI DAN MENCERDASKAN

MAJALAH SETJEN WANTANNAS

EDISI XIII
APRIL 2017

PENGARUH ASPEK SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DKI JAKARTA DALAM PILKADA 2017

WACANA PEMINDAHAN IBU KOTA KE PALANGKA RAYA

KAJIAN LUAR NEGERI KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN KE ARAB SAUDI

INOVASI TEKNOLOGI REFINING DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN ENERGI GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL

Salam Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian
Om Swastyastu
Shalom

Panasnya suhu politik telah menggiring dan mengkotak-kotakan siapa mendukung siapa. Demokrasi yang kita bangun, akan sangat disayangkan jika dicederai dengan sikap keangkuhan dan sikap saling menjelekkan, bahkan cenderung memfitnah. Dalam berdemokrasi ada sebuah konsekuensi atas cara berdemokrasi yang kita pilih untuk memilih pemimpin secara langsung, yang sudah barang tentu membawa konsekuensi baik dan buruk. Cara merebut simpati dengan saling menjelekkan, saling memfitnah, dan mendukung secara membabi buta adalah bagian dari demokrasi itu sendiri. Kita lupa bahwa siapapun yang kita pilih tidaklah sempurna bak malaikat. Sudah barang tentu, para calon pemimpin yang akan kita pilih masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Dengan demikian, yang patut kita cermati adalah visi dan misi dari masing-masing calon untuk membawa kehidupan yang adil dan makmur.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan (kekuasaan) rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintahan. Jika kita melihat arti demokrasi sesungguhnya, maka hiruk pikuk jalannya Pemilihan Kepala Daerah diseluruh Indonesia, seharusnya makin mendewasakan kita sebagai sebuah bangsa yang besar dengan beragam suku, etnis, agama dan lain sebagainya.

Mari tegakkan berdirinya sebuah bangsa yang bersendikan Pancasila dalam semua aspek kehidupan, karena hanya dengan bersandar kepada pancasila, maka bangsa Indonesia akan selamat dari sebuah kehancuran yang disebabkan oleh kepentingan-kepentingan tertentu.

REDAKSI

Gambar oleh : Google

Redaksi
MAJALAH CATRA
Jl. Medan Merdeka Barat No.15
Jakarta Pusat - 10110
Telp. 021- 3863983 Fax 021-3441683
email: rodangmas@dkn.go.id

DAFTAR ISI

OPINI

4 WACANA PEMINDAHAN IBU KOTA KE PALANGKA RAYA

6 MEMBACA JAMAN DENGAN BUAH PIKIRAN KARTINI

TAJUK UTAMA

9 PENGARUH ASPEK SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DKI JAKARTA DALAM PILKADA 2017

PROFIL

14 MAYJEN TNI ARIS MARTONO HARYADI

KEBIJAKAN PEMERINTAH

16 SERTIFIKASI TANAH RAKYAT

INFO KITA

18 KAJIAN LUAR NEGERI KE ARAB SAUDI

19 SILATURAHMI DHARMA WANITA PUSAT

20 INOVASI TEKNOLOGI REFINING DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN ENERGI GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL

Inspirasi Bulan Ini

HIKMAH DARI KEHILANGAN

Pada suatu masa, di sebuah pedesaan hidup seorang pria tua dan keluarganya. Pria tersebut mengolah sebuah kebun dan memiliki beberapa hewan peliharaan, salah satu peliharaannya adalah seekor kuda jantan. Suatu ketika, kuda yang dimiliki pria tua tersebut hilang. Beberapa tetangga mengatakan sempat melihat kuda tersebut berlari melewati batas daerah yang tidak boleh dilewati oleh warga desa. Pria tua itu menjadi sedih, tetapi dia mengatakan, "Tidak apa, barangkali kejadian ini bukan sesuatu yang buruk dan siapa tahu akan datang sesuatu yang baik."

Setelah hari berganti hari, pada malam hari, pria tua itu dikejutkan dengan suara kuda. Dia langsung bangkit dan melihat ke arah luar rumah, tampak kudanya yang hilang telah kembali dan membawa seekor kuda betina entah milik siapa yang menjadi pasangannya. Tentu saja, seperti peraturan di desa itu, kuda yang tidak diketahui pemiliknya atau liar akan menjadi milik mereka yang menemukan. Para tetangga memberi selamat pada pria tua yang telah mendapatkan kembali kudanya serta tambahan satu kuda secara cuma-cuma.

Setelah waktu berjalan, anak laki-laki dari pria tua tersebut mulai berlatih untuk naik ke atas punggung kuda dan memacu kuda tersebut di sekitar area perkebunan. Sayangnya, pada suatu hari, anak laki-laki itu jatuh dari atas punggung kuda dan mengalami cedera kaki yang sangat parah. Perlu waktu lama untuk sembuh, tetapi sekalipun telah sembuh, anak laki-laki itu tidak bisa berjalan normal. "Tidak apa-apa, nak" ujar si pria tua, "Mungkin hal ini akan mendatangkan sesuatu yang lebih baik untuk mu,"

Dan seperti kejadian sebelumnya, si pria tua merasakan kembali sesuatu yang baik tersebut. Pada masa itu adalah masa perang, semua anak laki-laki di desa wajib memanggul senjata dan bertempur di medan perang. Tetapi karena cacat, anak laki-laki sang pria tua tetap di desa dan bekerja mengolah kebun. Tidak ada yang disesali, karena anak laki-laki itu juga bersikap sama seperti ayahnya, dia percaya akan ada hikmah di balik kejadian buruk yang menyebabkan dia kehilangan cara berjalan yang normal.

Tahun berganti tahun. Perang telah berakhir dan para anak laki-laki yang bertempur kembali ke desa. Ternyata hanya beberapa yang kembali, karena kebanyakan dari mereka ternyata tewas di medan perang. Sang pria tua sedikit bersyukur karena anak laki-lakinya tetap dalam kondisi sehat dan semakin pintar mengurus perkebunan. Sehingga, tidak ada yang perlu disesali karena bagi keluarga tersebut, kebahagiaan tidak hanya dinilai pada saat sesuatu terjadi, tetapi juga pada masa-masa setelahnya.

Kita harus belajar bahwa setiap kali kita merasa kehilangan, sesungguhnya apa yang kita tangisi tidak benar-benar hilang, karena pada saat yang tidak akan kita sangka, kita akan mendapatkan hikmah dari rasa kehilangan tersebut.****

DESI

WACANA
PEMINDAHAN IBU KOTA KE PALANGKA RAYA

Oleh: M. Iqbal

Di belahan bumi manapun, ibu kota suatu negara selalu tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dalam hal ini tentunya termasuk Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Jakarta telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan mengikuti alur pembangunan yang cukup signifikan. Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan negara tetapi sekaligus sebagai pusat perdagangan (bisnis). Konsekuensinya, Jakarta mengalami kompleksitas permasalahan baik dari aspek teknis maupun aspek sosial ekonomi.

Paling tidak ada dua permasalahan menonjol yang dirasakan masyarakat di Jakarta. Pertama, kemacetan lalu lintas yang dapat meningkatkan adrenalin pemicu stres bagi pengguna jalan raya. Kedua, munculnya banjir terutama pada saat curah hujan cukup tinggi baik lokal maupun aliran sungai dari luar Jakarta. Kedua permasalahan menonjol tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk dan gencarnya pembangunan karena tidak seimbangnya antara tuntutan situasi dengan tuntunan kondisi di Jakarta.

Jakarta dengan total luas wilayah administratif 7.640,83 kilometer persegi (663,33 km^2 daratan dan 7.640,83 km^2 perairan) memiliki penduduk sejumlah 9.607.787 jiwa. Dengan laju pertumbuhan 1,02 persen per tahun dan tingkat kepadatan 15.367 jiwa per kilometer persegi, menjadikan wilayah ini semakin penuh sesak dari tahun ke tahun. Selain itu, rasio ketersediaan prasarana jalan dengan total luas wilayah hanya 6,2 persen, atau masih jauh di bawah rasio ideal yang seharusnya 20 persen dari luas keseluruhan Jakarta. Permasalahan menjadi semakin kompleks karena jumlah sarana transportasi semakin meningkat dan tidak sebanding dengan pembangunan fasilitas jalan raya.

APA DAN BAGAIMANA SOLUSINYA?

Jakarta sebetulnya sudah cukup jenuh dengan kompleksitas permasalahannya. Salah satu wacana yang cukup mengemuka adalah dengan cara memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain. Beberapa negara sudah mengimplementasikan pemindahan ibu kota seperti Australia, Brazil, Pakistan, Malaysia, dan Myanmar yang dapat dijadikan sebagai referensi pembelajaran (*lessons learned*) bagi Indonesia. Akan tetapi, kita tentunya punya spesifikasi pertimbangan tersendiri untuk memindahkan ibu kota tersebut.

Wacana pemindahan ibu kota negara sudah mulai ada sejak era Presiden RI Soekarno, kemudian dikumandangkan lagi pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono, dan terakhir mencuat kembali pada era Presiden Joko Widodo saat ini. Ide pemindahan ibu kota negara pada dasarnya terkait dengan semakin padatnya jumlah penduduk (*over populated*) dan terbatasnya dukungan sumber daya lingkungan Jakarta.

Paling tidak ada dua opsi pilihan mendasar terkait dengan lokasi pemindahan ibukota negara. Pertama, pemindahan ibukota secara menyeluruh seperti di Brazil (dari Rio de Janeiro ke Brasilia). Kedua, pemindahan pusat administratif pemerintahan seperti di Malaysia (dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya). Baik opsi pertama maupun opsi kedua masing-masing punya kekuatan dan kelemahan terutama terkait dengan efisiensi dan efektifitas pelaksanannya. Sementara itu, lokasi pemindahannya bisa dekat atau jauh dari Jakarta. Untuk lokasi yang lebih dekat pilihannya pernah dikemukakan yaitu Jonggol atau Karawang atau Majalengka (Jawa Barat), Lebak (Banten), dan

Gambar oleh : Google

pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Untuk lokasi yang lebih jauh, wacana pilihannya adalah Palangka Raya atau Pangkalan Bun (Kalimantan Tengah), Banjarmasin atau Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Pontianak (Kalimantan Barat), Balikpapan atau Samarinda (Kalimantan Timur), dan Palembang (Sumatera Selatan). Dari beberapa pilihan lokasi tersebut, Palangka Raya dipandang sebagai tempat yang relatif paling cocok sebagai ibu kota negara pengganti Jakarta.

WACANA PALANGKA RAYA SEBAGAI IBU KOTA NEGARA

Wacana untuk menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota negara sebagai pengganti Jakarta pada awalnya berasal dari ide Presiden Soekarno. Pada waktu pertama kali menancapkan pembangunan kota ini pada tanggal 17 Juli 1957, Presiden pertama Reublik Indonesia tersebut bercita-cita menjadikan Palangka Raya sebagai modal dan model ibu kota negara yang berlandaskan konsep orisinil bangsa sendiri. Sayangnya wacana tersebut berhenti ditengah jalan karena pengaruh perkembangan situasi dan kondisi politik dalam negeri.

Saat ini pemerintah menghidupkan kembali wacana untuk menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota negara. Untuk itu Presiden telah mengarahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) agar melakukan kajian perihal pemindahan ibukota tersebut. Sesuai arahan Presiden, kajian harus dilakukan secara komprehensif dan akurat dengan catatan jangan sampai memberatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan jangan sampai harus berhutang untuk merealisasikannya.

Perspektif untuk menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota negara dipandang cukup tepat, paling tidak terkait dengan aspek geografis, geologis, dan geopolitis. Dari aspek geografis, Palangka Raya terletak di Pulau Kalimantan yang posisinya relatif berada di tengah-tengah Indonesia. Dengan luas wilayah daratan (2.399,50 km2), atau hampir empat kali lebih luas dari wilayah daratan Jakarta (663,33 km2), Palangka Raya lebih berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai ibu kota negara dibandingkan Jakarta. Dari aspek geologis, Palangka Raya relatif lebih aman terkait dengan bencana alam (khususnya gempa bumi), karena posisinya berada di luar jalur gugusan gunung api (*ring of fire*). Oleh karena itu, konstruksi pembangunan di kota ini cukup aman. Dari aspek geopolitis, Palangka Raya berada di luar Pulau Jawa dengan posisi dekat wilayah perbatasan, sehingga pengembangan kota ini sebagai ibu kota negara tidak bersifat Jawa sentris dan sekaligus dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

PENUTUP

Wacana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangka Raya sebetulnya bukan hal baru. Apabila Jakarta dipandang sudah sarat dan jenuh dengan segala kompleksitas serta permasalahannya, maka pilihan untuk menjadikan Palangka Raya sebagai ibu kota negara merupakan suatu keniscayaan. Namun pemindahan ibu kota negara bukan hal sederhana, karena memerlukan rencana dan tindakan yang cemerlang (*brilliant*) didukung oleh kuantitas dan kualitas ketersediaan sumber daya yang mumpuni (*accomplished*). Secara ideal, pemindahan ibu kota seyogianya adalah untuk pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat demi memperkuat ketahanan nasional.**** (Diolah dari berbagai sumber)

MEMBACA JAMAN DENGAN BUAH PIKIRAN KARTINI

Oleh: Indra Suryaman

Setiap kali masyarakat Indonesia ditanya tentang hari besar yang ada pada bulan bulan April, pasti secara spontan akan menjawab "HARI KARTINI". Ya... sebuah perayaan yang rutin kita laksanakan setelah Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1964 tanggal 2 Mei 1964 yang menetapkan Raden Ajeng Kartini (RA. Kartini) sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir RA. Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini.

Pada surat-surat RA. Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Kartini menulis ide dan cita-citanya, seperti tertulis: Zelf-ontwikkeling dan Zelf-onderricht, Zelf- vertrouwen dan Zelf-werkzaamheid dan juga Solidariteit. Semua itu atas dasar Religieusiteit, Wijsheid en Schoonheid (yaitu Ketuhanan, Kebijaksanaan dan Keindahan), ditambah dengan Humanitarianisme (peri kemanusiaan) dan Nasionalisme (cinta tanah air).

Terbitnya surat-surat RA. Kartini, seorang perempuan pribumi, sangat menarik perhatian masyarakat Belanda, dan pemikiran-pemikiran RA. Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Pemikiran-pemikiran RA. Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia.

Semasa hidupnya, RA. Kartini mungkin tak pernah berpikir untuk menjadi seorang tokoh emansipasi perempuan, apalagi berkeinginan untuk menjadi seorang pahlawan nasional yang namanya terus dikenang hingga saat ini.

Melihat apa yang telah dibuat oleh RA. Kartini pada masanya dengan perspektif masa kini maka sesungguhnya kita bisa jadikan sebagai teladan dalam beberapa hal yaitu mengenai semangatnya menimba ilmu di tengah ketidakmungkinan, menjadi inspirasi bagi kaum perempuan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat

Saat ini emansipasi sudah tidak lagi menjadi problem yang serius, perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki bahkan pemerintah secara serius menjamin hal tersebut dalam berbagai aturan dan perundangan-undangan. Menjadi Kartini modern yang holistik di zaman globalisasi ini mempunyai tantangan

tersendiri. Kartini modern tidak hanya seorang wanita karier dengan pendidikan tinggi dan profesi bergengsi. Seorang ibu rumah tangga pun bisa dikatakan kartini modern ketika mampu menjadi sosok ibu yang cerdas dalam mengelola kehidupan keluarga, dan akan lebih hebat lagi jika seorang ibu mampu berperan ganda baik sebagai wanita karier di luar rumah dan ketika jadi ibu sejati di dalam keluarga. Pendidikan menjadi hal pertama dan utama dalam fondasi keluarga, disinilah ibu berperan sangat vital. Konsep emansipasi ini menarik. Apa memang benar bahwa yang namanya emansipasi itu berarti semua sama rata? Apa emansipasi itu berarti wanita mendapatkan hak dan kewajiban yang sama persis seperti yang laki-laki dapatkan? Dan apa yang namanya emansipasi itu berarti wanita bisa mengerjakan semua yang dikerjakan oleh seorang lelaki?

Gambar oleh : Google

Emansipasi wanita bukanlah hal yang patut dilebih-lebihkan, apalagi dijadikan dalih sebagai tameng untuk membela kepentingan pribadi.

Raden Ajeng Kartini sendiri mungkin akan sedih kalau ternyata emansipasi yang dia perjuangkan dipahami secara salah. Konsep emansipasi lahir karena adanya ketidakadilan yang diberlakukan kepada kaum wanita dan adanya ketidaksamaan hak yang dimiliki oleh wanita dibanding pria karena alasan gender. Arti emansipasi wanita yang mungkin bisa dipahami adalah suatu persamaan hak yang diberikan kepada kaum wanita tanpa diskriminasi gender. Hak ini harus diberikan secara proporsional dan adil (bukan sama persis). Bagaimana seorang wanita mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan bagaimana kaum laki-laki menghormati serta memperlakukan wanita sebagaimana mestinya; tidak meremehkan, tidak mengeksploitasi, apalagi menyiksa.

Tidak sedikit wanita yang mencetak prestasi dan mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan prestasi-prestasi yang diperolehnya. Sri Mulyani Indrawati contohnya. Wanita yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan RI, dan juga pernah menjadi direktur pelaksana Bank Dunia ini mempunyai segudang capaian baik di Indonesia maupun dunia internasional. Lain lagi dengan Megawati Soekarno Putri yang merupakan wanita Indonesia dengan capaian politik tertinggi setelah berhasil menduduki kursi RI 1 pada tahun 2001 lalu. Belum lagi Mooryati Soedibyo, cucu Sri Susuhunan Paku Buwono X dari Keraton Surakarta ini, yang menjabat sebagai Presiden Direktur Mustika Ratu. Selain itu, masih banyak lagi wanita-wanita hebat yang telah menorehkan prestasi dibidangnya masing-masing. Pada bidang politik Bukti nyata dari hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 65 ayat 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tanggal 18 Februari 2003 yang berbunyi "Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".

Ketentuan dari Undang Undang (UU) di atas merupakan tindak lanjut dari konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu persoalan yang menyangkut penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

Selain itu, *Inter Parliamentary Union* (Uni Antar Parlemen) pada 1997 di New Delhi mendeklarasikan "Hak politik perempuan harus dianggapi sebagai satu kesatuan dengan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak politik perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia". UU dan konvensi PBB tersebut menandakan bahwa dalam ranah politik peran perempuan sudah mulai diakui dan diperhitungkan.

Pada bidang ekonomi, tidak sedikit perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau membantu suami bekerja. Bahkan ada beberapa

perempuan yang mengerjakan pekerjaan laki-laki sebagai supir bus. Hal ini terlihat pada Perusahaan Transjakarta Busway yang memiliki 80 pengemudi perempuan. Dalam bidang sosial, perempuan yang dulu lekat dengan stigma kasur, sumur, dan dapur sekarang telah mampu bangkit dan menggeser stigma kasar tersebut. Bahkan, dalam bidang sosial ini kaum perempuan telah memiliki benteng untuk melindungi diri dari pengaruh globalisasi dalam bidang sosial ini. Kaum perempuan telah dilindungi oleh UU pornografi dan pornoaksi yang banyak menyita perhatian khalayak. Pada hakikatnya UU tersebut adalah sebuah bentuk perlindungan kehormatan perempuan yang dijadikan bahan eksploitasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Namun, dunia emansipasi wanita juga memiliki persoalan khususnya perempuan generasi muda, tidak sedikit dari mereka terlena dan terombang-ambing oleh arus globalisasi yang semakin mewarnai dan meracuni bangsa. Tidak sedikit efek dari era globalisasi ini berpengaruh negatif sehingga tidak menutup kemungkinan partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa pada masa mendatang tidak dapat berjalan, sehingga tidak ada lagi pembuktian bahwa perempuan mampu berdiri membangun bangsa. Bahkan, persoalan ini apabila dibiarkan dan tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan akan dapat menciptakan generasi muda yang bimbang dan tidak memiliki masa depan yang pasti.

Kaum wanita seharusnya dapat memanfaatkan emansipasi wanita yang sudah diperjuangkan Kartini dengan sebaik-baiknya, yaitu membekali diri untuk berpartisipasi membangun bangsa ini, mengharumkan nama kaum perempuan, membuat bangga bangsa dan tidak menjadi seseorang yang menjatuhkan martabatnya sebagai seorang perempuan. Emansipasi perempuan ini seharusnya dapat men-jadikan generasi muda perempuan yang cerdas bukan menjadi lemah. Jadikan perempuan sebagai subjek bagi bangsa ini dan tidak hanya menjadi objek.

Sekalipun masih ada suara-suara sumbang tentang sosok RA. Kartini yang dijadikan sebagai pahlawan nasional, khususnya dalam hal emansipasi wanita, akan tetapi sesungguhnya bangsa Indonesia patut bersyukur dengan ditetapkannya RA. Kartini sebagai tokoh emansipasi sejak 53 tahun yang lalu. karena pada kenyataan bangsa ini sudah memulai sebuah tradisi yang baik dalam menempatkan partisipasi kaum wanita dalam kerangka yang penting dalam membangun bangsa dan negara.

Dalam ilmu sejarah, ikon sangat diperlukan oleh suatu kaum karena dalam sebuah peradaban ikon tersebut dapat digunakan sebagai contoh, semangat dan pelajaran. Penetapan RA. Kartini sebuah ikon emansipasi wanita menjadikan kata emansipasi sebagai pembuka ruang bagi banyak kaum wanita untuk memasuki berbagai kesempatan tanpa lagi berpikir tentang diskriminasi tanpa dasar.

Selamat Hari Kartini, selamat mejadi wanita yang memiliki kesempatan besar dalam menaklukkan dunia, semoga semuanya akan bermanfaat untuk bangsa dan negara ini dan tetaplah menjadi wanita seutuhnya.****

Gambar oleh : Google

PENGARUH ASPEK SOSIAL BUDAYA TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DKI JAKARTA DALAM PILKADA 2017

Oleh : Laksda TNI Dr. Djajeng Tirto Soedarsono

"Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Pemilu dimasa lalu belum mampu memberikan pijakan yang kuat yang mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang baik bagi bangsa ini".

Pasca reformasi, Indonesia secara berkesinambungan terus mengupayakan proses demoktratisasi yang sehat melalui penyelenggaraan pemilihan langsung baik ditingkat pusat maupun di daerah. Salah satu yang paling menyorot perhatian dan energi bangsa ini adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Pilkada Jakarta selalu menarik dan menyedot perhatian seluruh penjuru negeri, tidak saja karena berlokasi tepat di jantung negara, melainkan bahwa Jakarta sejak dulu sudah di anggap sebagai laboratorium dan barometer bangsa baik dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Masyarakat yang memiliki kesadaran berdemokrasi sejatinya adalah langkah awal menuju jalur demokrasi yang benar. Aktualisasi dari *civil education* untuk membentuk masyarakat yang memiliki keadaban demokratis terletak pada tingkat partisipasi politik rakyat disetiap momentum politik seperti Pilkada. Partisipasi politik sendiri merupakan salah satu indikator tercapainya suatu pemerintahan yang demokratis.

Salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah aspek sosial dan budaya. Sebagaimana diketahui, manusia sebagai makhluk sosial terus menerus mengalami perubahan sosial yang dapat terlihat dari bagaimana manusia berperilaku dan berinteraksi satu sama lain, cara berbicara, cara berpakaian, partisipasi politik, cara merespon suatu masalah dan lain-lain.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan merupakan salah satu unsur tak terpisahkan dalam perubahan sosial. Budaya dapat di artikan sebagai suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Korelasi antara dimensi sosial budaya dengan dimensi politik dalam hal ini bagaimana aspek sosial budaya mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Jakarta dalam Pilkada menjadi penting untuk dipelajari.

DEFINISI SOSIAL DAN BUDAYA SERTA PERANANNYA

Masalah sosial budaya seringkali bersifat multidimensional dan memerlukan kajian disiplin ilmu yang integratif. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan sosial budaya, perlu dipahami definisi kedua suku kata dimaksud secara terpisah. Sosial menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia milik W.J.S Poerwadarminta adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan (kepentingan umum).

Adapun budaya secara etimologi berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah atau Bodhya,* jamak dari *buddhi* (budi atau akal) yang di artikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan pikiran/akal manusia yang mengandung cinta, rasa dan karsa. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan

disebut *culture* yaitu mengolah atau mengerjakan.

Dengan demikian Sosial budaya dapat didefinisikan sebagai segala hal yang dicipta oleh manusia berdasarkan budi nurani dan pikirannya dalam kehidupan bermasyarakat. Implementasi sehari-hari dapat berupa kesenian, pengetahuan, moral, hukum, kepercayaan, adat istiadat ataupun ilmu. Manusia sebagai pelaku sosial merupakan makhluk yang selalu mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana manusia tersebut berada. Budaya pada dasarnya bersifat dinamis dan mengalami perkembangan perubahan seiring perkembangan manusia itu sendiri. Perubahan kebudayaan bisa saja terjadi akibat adanya perubahan sosial dalam masyarakat dimana situasi sosial budaya dapat berkembang dan tercipta karena adanya kaitan erat antara kebudayaan dan sosial itu sendiri.

Perubahan sosial budaya sendiri dapat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan sosial manusia baik sebagai individu maupun anggota masyarakat di antaranya terkait dengan nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang interaksi sosial. Hal ini wajar mengingat budaya adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia selama manusia itu masih ada.Beberapa dampak negatif kebudayaan bagi kehidupan sosial manusia diantaranya: 1) Menimbulkan kerusakan lingkungan dan kelangsungan ekosistem alam; 2) Mengakibatkan adanya kesenjangan sosial yang kemudian menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit sosial, termasuk tingginya tingkat kriminalitas; dan 3) Mengurangi bahkan dapat menghilangkan ikatan batin dan moral yang biasanya dekat dalam hubungan sosial antar masyarakat.

Masyarakat Jakarta sebagai masyarakat urban yang modern dengan karakteristik seperti *individualism* dan rasionalitas diatas *perspektif* keagamaan, interaksi berbasis kepentingan dan ciri-ciri lainnya, merupakan tempat akumulasi, distribusi, dan sirkulasi modal baik materi maupun sosial, sehingga keputusan lebih banyak ditentukan oleh mereka yang berkepentingan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Harvey dan Castells (dalam Barker, 2001: 392) bahwa pembentukan kota bukanlah karena akibat dari 'kekuatan alam', melainkan kekuasaan kapitalisme dalam menciptakan pasar. Jakarta merupakan megapolitan dimana pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia berlangsung dan tempat bertemunya berbagai macam budaya dan pengaruh dari berkembangnya kapitalisme dimana perubahan sosial dan budaya dapat terjadi. Beberapa faktor pendorong perubahan sosial diantaranya: **1) Komunikasi.** Peralatan telekomunikasi yang dilakukan dengan jarak jauh tanpa harus bertemu langsung dengan orang telah menimbulkan efek-efek tersendiri yang mengakibatkan juga terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat; **2) Cara berpikir masyarakat.** Dengan meningkatnya pengetahuan dan pendidikan, masyarakat sekarang lebih mengedepankan pikiran logis dan ilmu pengetahuan, sehingga pola pandang masyarakat terhadap suatu masalah akan mempengaruhi terjadinya penyikapan yang berbeda; **3) Jumlah penduduk.** Semakin banyak penduduk yang mendiami suatu daerah, maka masalahnya akan semakin kompleks. Masalah-masalah sosial ini akan memicu perbedaan *respond* dan mengakibatkan perubahan tatanan sosial budaya pada masyarakat. **4) Penemuan hal baru.** Merupakan inovasi yang merubah cara-cara masyarakat berperilaku seperti teknologi komunikasi. **5) Konflik.** Konflik seperti perang akan memaksa budaya asing masuk dan memicu terjadinya perubahan sosial budaya. **6) Bencana alam.** Memicu korban yang selamat bergabung dengan korban selamat lainnya, membentuk komunitas baru yang dapat memiliki aspek sosial budaya lain. **7) Kebudayaan masyarakat lain.** Masuknya kebudayaan lain yang memicu terbentuknya budaya campuran.

SEJARAH SOSIAL BUDAYA JAKARTA

Sebagai kota dagang pada awal masa berdirinya, menjadikan kota Jakarta menjadi magnet tersendiri bagi pendatang dari seluruh penjuru nusantara. Hal ini mengakibatkan Jakarta memiliki masyarakat yang heterogen atau multikultural. Dalam perkembangannya, berbagai macam suku bangsa ini membentuk sebuah budaya campuran dari beragam etnis/suku. Suku-suku yang mendiami Jakarta diantaranya; Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari nusantara, budaya, Jakarta juga banyak menyerap dari budaya luar seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugal.

Dalam data Sensus Penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 yang mengelompokkan suku bangsa dan agama berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa suku Jawa menempati persentase tertinggi sebagai penduduk Jakarta yaitu sebesar 35,94 persen (3,453 juta jiwa). Suku Betawi menempati urutan kedua 28 persen (2,700 juta); di ikuti oleh Sunda 14, 62 persen (1,395 juta); dan suku bangsa lainnya sebesar 21, 63 persen (Tiongkok, Batak, Minangkabau, Malayu, Madura, Sumatera Selatan, Bugis, Maluku, Kalimantan dan suku di Sulawesi lainya).

Dengan beragamnya suku bangsa penduduk Jakarta, asimilasi budaya menjadi tidak terhindarkan. Budaya Betawi sebagai budaya penduduk asli Jakarta telah mengalami berbagai

dan berulang kali proses asimilasi dan adaptasi.

Meski terkesan minoritas baik dalam jumlah dan hal-hal lainnya, budaya Betawi tidaklah pernah tergusur atau digusur dari Jakarta, karena proses asimilasi dari berbagai suku yang ada di Indonesia hingga kini terus berlangsung. Proses ini sedikit banyak selaras dengan definisi dan sifat dari budaya dimana budaya pada dasarnya bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan mengalami perkembangan secara dinamis seiring perkembangan manusia itu sendiri.

Dalam konteks kebangsaan, pola pikir sistem sosial budaya masyarakat Jakarta pada dasarnya bisa dikatakan tidak berbeda dari masyarakat lainnya di Indonesia, Sebagai kota megapolitan dan multikultural, Jakarta tidak *immune* terhadap perubahan sosial budaya. Asimilasi budaya betawi dan suku-suku lainnya di Jakarta menunjukkan bahwa perubahan sosial budaya masih terus berlangsung. Arus modernisasi yang tak terbendung juga memaksa masyarakat Jakarta terus menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman. Masyarakat Jakarta hari ini adalah masyarakat modern yang sebagian besar warganya mempunyai orientasi nilai budaya yang terarah ke kehidupan dalam peradaban masa kini.

Ciri-ciri ini selaras dengan karakteristik sosial budaya masyarakat perkotaan (*urban community*) yang disampaikan Max Weber seorang pakar ekonomi politik dan sosiolog dari Jerman tentang *urban community* yaitu: 1) Kehidupan keagamaan berkurang, lebih mengedepankan *logical thinking;* 2) Mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain (perorangan atau individualistik); 3) Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata (bukan gotong royong); 4) Interaksi yang terjal lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi; 5) Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu; dan 6) Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh dari luar.

Pada kondisi-kondisi tertentu, sikap dan perilaku politik merupakan cerminan dari latar belakang sejarah dan akar budaya tertentu.

Gambar oleh : Google

ASPEK SOSIAL BUDAYA ERAT HUBUNGANNYA DENGAN POLITIK

Pada kondisi-kondisi tertentu, sikap dan perilaku politik merupakan cerminan dari latar belakang sejarah dan akar budaya tertentu. Selain itu dapat juga merupakan menifestasi dari perkembangan politik atau bahkan akibat dari manipulasi politik tertentu. Dimensi politik dan dimensi sosial budaya menjadi semacam dua sisi dari mata pisau yang tidak dapat dipisahkan. Secara konseptual, baik dimensi sosial budaya dan dimensi politik memiliki inter-relasi yang saling mempengaruhi sebagai suatu konsep terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai dan ketrampilanseluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungan khusus serta pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok pada masyarakat. Pada konteks saat kini, aspek sosial budaya berpengaruh pada bagaimana masyarakat Jakarta berperilaku politik.

Secara garis besar, orientasi pemilih di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Orientasi *Policy-Problem Solving*

Pemilih menilai seorang kontestan dari kacamata *"policy-problem-solving"*, sejauh mana kontestan mampu menawarkan program kerja atau solusi bagi suatu permasalahan yang ada, secara objektif cendering memilih kontestan yang memiliki kepekaan terhadap masalah nasional (daerah) dan kejelasan program kerja partai politik.

2. Orientasi Ideologi

Pemilih cenderung mementingkan ikatan ideologi suatu partai atau kontestan, akan menekankan aspek-aspek subjektivitas seperti kedekatan nilai, budaya, norma, emosi dan psikografis.

Sedangkan Partisipan politik (disebut sebagai "pemilih") di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 (empat) tipe sebagai berikut: 1) Pemilih tradisional yang berorientasi ideologi yang tidak terlalu melihat kebijakan partai politik/seorang kontestan sebagai sesuatu yang penting dalam pengambilan keputusan; 2) Pemilih skeptis yang tidak memiliki orientasi ideologi dengan sebuah partai politik/seorang kontestan, juga tidak menjadikan kebijakan sebagai sesuatu yang penting; 3) Pemilih rasional yang berorientasi tinggi pada *"policy-problem-solving"* dan berorientasi rendah untuk faktor ideology; dan 4 Pemilih kritis sebagai perpaduan antara tingginya orientasi pada kemampuan partai politik/seorang kontestan dalam menuntaskan pemasalahan bangsa maupun tingginya orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis.

(Sumber : http://www.rumahpemilu.org/in/read/4174/Dari-Pemilih-Tradisional-ke-Rasional-Kritis-oleh-Fajar-Kurnianto)

Pasca reformasi dimana iklim demokrasi diberikan ruang yang lebih bebas, diiringi dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi bangsa, perkembangan teknologi serta perbaikan diberbagai bidang serta jumlah pemilih rasional dan pemilih kritis mulai meningkat dibeberapa kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta. Myron Wiener lebih lanjut menyebutkan setidaknya ada 5 faktor yang mempengaruhi partisipasi politik suatu masyarakat sebagai berikut: 1) Modernisasi disegala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi, berakibat meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik; 2) Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah; 3) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan; 4) Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa/partisipasi yang dimobilisasikan; dan 5) Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan sehingga merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan keputusan politik.

Dalam konteks Jakarta, perubahan sosial seperti modernisasi, meningkatnya kelas menengah, meningkatnya tingkat pendidikan (kaum intelektual), meningkatnya peran pemerintah dalam ekososbud, serta penggalangan massa oleh pemimpin politik memicu meningkatnya *euphoria* publik untuk berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta.

Ini bisa dilihat dari bertambahnya dana yang dialokasikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2017. Wiener lebih lanjut mengatakan setidaknya ada dua faktor pendorong bagi menguatnya partisipasi politik. Pertama, tumbuhnya angkatan kerja perkotaan yang bekerja di sektor industri yang mendorong timbulnya organisasi buruh; Kedua, pertumbuhan komunikasi massa yaitu karena perkembangan kehidupan sosial dan budaya seperti jumlah penduduk, transportasi, komunikasi antara pusat-pusat kota dan daerah terbelakang, penyebaran surat kabar, penggunaan alat elektronik seperti radio, televis, dan lain sebagainya.

Hal-hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak kebijaksanaan pemerintah terhadap kehidupan warga negara.

Partisipan politik Pilkada DKI Jakarta

Gambar oleh : Google

Menjelang Pilkada 2017, bermain pada isu-isu berbau agama dan kesukuan masih digunakan oleh beberapa pendukung kandidat Gubernur DKI Jakarta

Ikrar Nusa Bhakti dalam pernyataannya terkait Pilkada Jakarta 2017 menyampaikan bahwa penduduk DKI Jakarta adalah tipe pemilih rasional dimana sosok gubernur yang akan dipilih warga Jakarta adalah sosok yang dapat bekerja untuk melakukan pembangunan. Isu-isu konservatif dalam kampanye politik seperti agama dan kesukuan tidak lagi dipandang sebagai hal yang truistik bagi masyarakat Jakarta melainkan harus dikritisi sesuai dengan nilai-nilai universal masyarakat modern, mengakibatkan pemilih Jakarta cenderung bersikap egaliter.

Namun demikian, pengamat politik Universitas Indonesia, Cecep Hidayat berpendapat bahwa meskipun terkesan rasional, sesungguhnya ada dua sifat yang dimiliki oleh pemilih Jakarta yaitu berubah-ubah (*swing voters*), dan rasional (*rational voters*). Dua ciri khas tersebut menyebabkan arah pertarungan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sangat sulit diprediksi.

Diatas kertas, pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat memang unggul. Namun prediksi tersebut dapat dengan mudah berubah karena sifat pemilih Jakarta yang tidak pasti dan rasional. Dari pernyataan tersebut, tersirat makna bahwa selain rasional dan kritis, budaya masyarakat kota Jakarta tidak kebal terhadap sesuatu yang baru dan bertindak berdasarkan kepentingan sehingga sewaktu-waktu dapat mengganti pilihan politiknya yang di pandang lebih sesuai dan menguntungkan.

Meskipun sedikit berbeda, secara karakteristik, apa yang disampaikan Ikrar Nusa Bhakti dan Cecep Hidayat mengenai pemilih Jakarta selaras dengan karakteristik sosial budaya masyarakat perkotaan (*urban community*) yaitu lebih mengedepankan *logical thinking,* individualis bertindak berdasarkan kepentinganyang dipandang dapat menguntungkan/membawa dampak positif, baik langsung maupun tidak langsung, dan dapat menerima perubahan (Max Weber).

Menjelang Pilkada 2017, bermain pada isu-isu berbau agama dan kesukuan masih digunakan oleh beberapa pendukung kandidat Gubernur DKI Jakarta. Gubernur *incumbent* yang terseret kasus penistaan agama baru-baru ini, membuktikan bahwa isu konservatif semacam inipun masih "menjual" untuk dimainkan meskipun masyarakat menanggapinya secara berbeda-beda pemberitaan terkait masalah ini sempat masif dan memenuhi linimasa media-media sosial di tanah air.

Dinamika sosial dan budaya tidak bisa lepas dari faktor sosial ekonomi seperti stratifikasi sosial atau kelas sosial. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya konflik antar kelompok dengan menggunakan media. Sejarah membuktikan bahwa media tidak kebal dari kepentingan dan sering digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk propaganda demi mencapai tujuannya.

Perkembangan teknologi informasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan aspek sosial ekonomi serta *critical literacy* akan mengakibatkan perpecahan. Ini semakin diperumit karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media di Indonesia tergolong sangat tinggi. Masyarakat Indonesia memilih media sebagai sumber informasi yang paling dipercaya dibandingkan dengan institusi pemerintah. Media merupakan subjek yang mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias dan keberpihakannya,

Dengan demikian konstruksi sosial budaya yang terjadi pada masyarakat dapat dipengaruhi oleh realitas yang dibentuk media. Meski pemilih rasional dan pemilih kritis terkesan mendominasi tipe pemilih di Jakarta, pemilih tipe tradisional dan skeptis juga masih banyak ditemukan di Jakarta, meskipun untuk tipe terakhir jumlahnya diperkirakan akan terus menurun seiring dengan pendidikan politik masyarakat yang terus membaik.****

MAYJEN TNI ARIS MARTONO HARYADI

PERWIRA TINGGI YANG LOW PROFILE DAN PEKERJA KERAS

Bbertempat di Lantai 4 Gedung A, di sanalah Tim Majalah Catra menemui Mayjen TNI Aris Martono Haryadi, Deputi Bidang Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Desisnas Setjen Wantannas). Aris terlahir dari orang tua yang juga berkecimpung di dunia militer dengan pangkat terakhir Kapten. Putra kedua dari tujuh bersaudara ini mengaku menjadi anggota TNI adalah cita-citanya sejak kecil. Aris lahir dan besar di kota Magelang, 56 tahun silam. Bermukim di kawasan komplek militer akhirnya timbul keinginannya untuk juga menjadi anggota TNI. Keinginannya ia wujudkan saat lulus dari Sekolah Menengah Atas di Magelang pada 1980, ia pun langsung mendaftar Akabri di Semarang dan lulus pada 1984 dengan Corps Infanteri.

Mayjen TNI Aris Martono Haryadi adalah sosok Perwira Tinggi yang low profile dan pekerja keras. Hal ini tergambar jelas dari penugasan Perwira pertamanya di Palembang selama 10 tahun. Mulai dari menjabat Komandan Peleton Batalyon Infanteri II/141 AYJP Kodam II/Sriwijaya sampai pada jabatan Guru Militer Pusat Pendidikan Infanteri pernah diembannya. Selama di Palembang, bertugas di Yonif 141/AYJP, separuh waktunya dihabiskan di daerah penugasan Timor Timur. Selain itu, mengikuti latihan mulai tingkat perorangan sampai dengan latihan tingkat Bitalyon sekaligus uji coba daerah latihan milik TNI AD di Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku di Baturaja serta mengikuti Pendidikan Pengembangan Umum dan Pendidikan Spesialis di Bandung.

Aris Martono Haryadi, bapak dengan dua orang anak ini, selama berkecimpung dalam dunia militer, memang lebih banyak mendapatkan penugasan-penugasan di daerah. Selain Palembang, Aris pernah 2 kali bertugas di Wilayah Kalimantan. Pertama saat ia berpangkat Mayor, mendapat penugasan di Komando Resor Militer (Korem) 121/ABW tahun 1997-1999. Kedua saat ia berpangkat Brigadir Jenderal TNI menjabat sebagai Kasdam XII/TPR tahun 2014-2016. Begitu banyak pengabdian dan prestasi yang sudah ditorehkan Aris selama di Kalimantan. Salah satunya pada saat Aris menjabat Kepala Staf Daerah Militer XII Tanjungpura (Kasdam XII/Tpr) dan masih berpangkat Brigadir Jenderal TNI, melaksanakan program Bedah rumah yang merupakan Program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD).

Sekadar informasi, TMMD sendiri merupakan kegiatan rutin yang digelar TNI selama dua kali dalam setahun. Tujuannya adalah untuk membangun kemanunggalan TNI dan masyarakat serta membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan. Pelaksanaan Bedah Rumah yang saat itu dilakukan oleh Korem 121/ABW dinilai berhasil serta menuai simpati masyarakat. Prestasi lainnya, masih di wilayah Kalimantan yaitu di Korem 102/Panju Panjung, TMMD yang dilaksanakan di Desa Luwe, Kecamatan Lahei Barat Kabupaten Barito Timur, dinilai Pemerintah Daerah lebih efektif dan ekonomis jika dibandingkan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan. Sebagai contoh, program TMMD pembukaan badan jalan tembus ke desa dan ibu kota kecamatan. Bahkan menurut Ketua DPRD (pada waktu itu), Barito Utara Set Enus Y Mebas, program yang dilaksanakan melalui TMMD memiliki risiko kendala yang jauh lebih kecil ketimbang proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor yang memungkinkan ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat.

Bukan hanya pekerja keras. ternyata Aris pun tak segan-segan untuk menyambangi dan berbaur dengan masyarakat. Aris kerap melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan dan tak sungkan untuk terjun langsung ke lapangan. Kegiatan olah raga adalah salah satu favoritnya. Seperti yang pernah dilakukan pada 3 November 2015 silam, Aris bersama masyarakat Kalimantan Barat mengikuti kegiatan Fun Bike HUT TNI ke-70, ia pun pernah

menjuarai pertandingan Tenis Lapangan antar instansi di Kalimantan Barat. Masih di wilayah Kalimantan, Aris diangkat sebagai Ketua Umum Inkai Kalimantan Barat untuk periode 2015-2019, ia dilantik oleh Sekjen Inkai Pusat Machrup Elrik.

Berbagai jenjang karir telah ia lewati. Mulai dari Pamen Mabes TNI AD (Dik Sesko TNI), Pamen Denma Mabes TNI AD (Dik Lemhannas), Waaspers Kasad, Staf Khusus Kasad sampai yang terakhir adalah Deputi Bidang Sistem Nasional Setjen Wantannas. Penugasan sebagai Desisnas Setjen Wantannas ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 49/TPA Tahun 2016 tanggal 12 Mei 2016 dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/404/V/2016 tanggal 20 Mei 2016. Aris dilantik pada 10 Juni 2016 oleh Letjen TNI Muhamad Munir (Sesjen Wantannas pada waktu itu) serta mendapat kehormatan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada 22 Juni 2016 silam. Selama bertugas di Wantannas, Aris tidak melu

Brigjen TNI Aris Martono Haryadi dilantik
Sebagai Ketua Umum Inkai Kalimantan Barat

pakan kebiasaannya akan kerja keras. Banyak sudah produk-produk kajian yang ia hasilkan sebagai rekomendasi kepada Presiden RI. Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 101 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Aris selaku Desisnas mempunyai tugas membantu Sesjen Wantannas dalam menyelenggarakan pengamatan, evaluasi, analisis, dan perumusan Sistem Nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Ia membawahi empat Pembantu Deputi yaitu (1) Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Pemerintahan Negara; (2) Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam; (3) Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial; dan (4) Pembantu Deputi Urusan Informasi dan Pengolahan Data.

Mayjen TNI Aris Martono Haryadi adalah sosok Jenderal yang rendah diri dan pekerja keras. Pantaslah kiranya jika ia dijadikan contoh dan tauladan. Semoga apa yang telah ia lakukan untuk Setjen Wantannas dapat bermanfaat untuk bangsa dan negara Republik Indonesia tercinta.****

DATA DIRI

- **NAMA : Aris Martono Haryadi**
- **PANGKAT/CORPS : Mayor Jenderal TNI**
- **JABATAN : Deputi Bidang Sistem Nasional**
- **KESATUAN : Dewan Ketahanan Nasional**
- **TMT ABRI : 27 September 1984**
- **TTL : Magelang, 24 Maret 1961**
- **SUKU BANGSA : Jawa**
- **AGAMA : Islam**
- **STATUS : Menikah**
- **PENDIDIKAN : Strata 1**
- **JUMLAH ANAK : 2 (dua) orang**

KECAKAPAN BAHASA :

- **INGGRIS : Aktif**

PENUGASAN DAERAH OPERASI :

- **Operasi Seroja tahun 1985**
- **Operasi Seroja tahun 1986**
- **Operasi Seroja tahun 1987**
- **Operasi Seroja tahun 1990**
- **Operasi Seroja tahun 1999**

PENUGASAN LUAR NEGERI :

- **Singapura 1994**
- **Malaysia 1998 dan 2013**
- **Thailand 2004**
- **Swiss 2010**
- **Turki 2011**
- **Singapura 2013**
- **Jerman 2013**

RIWAYAT JABATAN :

1. **DANTON YONIF-DAM II/SWJ**
2. **DANTON SMB/BANT**
3. **DANKIBANT YONIF-141/BS**
4. **DANKIMA YONIF-147/BS**
5. **KASI-4/LOG YONIF-147/BS**
6. **KASI-3/PERS YONIF-147/BS**
7. **GUMIL GOL-VI DEPNIK PUSDIKIF**
8. **KASIJAT DEPNIK PUSDIKIF**
9. **PAMEN PUSSENIF (DIK SESKOAD)**
10. **KASI OPS KOREM 121/ABW**
11. **KASI TER KOREM 121/ABW**
12. **DANYONIF621/MTG**
13. **DANDIM 1002/BRB REM 101/ANT**
14. **DANDIM 1006/MTP REM 101/ANT**
15. **PBDYA-3/DIAGA PB-1/REN**
16. **PAMEN MABESAD (DIK SESKO TNI)**
17. **PBDYA-3/DIAGA PB-1 REN**
18. **ASPERS KASDIVIF-1 KOSTRAD**
19. **ASPERS DAM III/SLW**
20. **PABAN-1/REN SPERSAD**
21. **PAMEN DENMA MABESAD (DIK LEMHANNAS)**
22. **DIRBINDIK SESKOAD**
23. **WAASPERS KASAD**
24. **KASDAM XII/TPR**
25. **STAF KHUSUS KASAD**
26. **DEPUTI SISTEM NASIONAL SETJEN WANTANNAS**

PROGRAM STRATEGIS

SERTIFIKASI TANAH RAKYAT

Oleh: Desi

Reforma Agraria merupakan implementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR RI), Nomor IX/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003 tanggal 7 Agustus 2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

Reforma Agraria atau secara legal formal disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".

MAKSUD REFORMA AGRARIA

1. Menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria;
2. Menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan;
3. Meningkatkan berkelanjutan sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia; serta
4. Meningkatkan harmoni kemasyarakatan.

TUJUAN REFORMA AGRARIA

1. Mengurangi kemiskinan.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Memperbaiki akses masyarakat kepada sumber sumber ekonomi, terutama tanah.
4. Menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria.
5. Mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan.
6. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
7. Meningkatkan ketanahan pangan dan energi masyarakat.

Pada sebuah kesempatan di Taman Raja Batu, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada 25 maret 2017, Presiden RI Ir. H. Joko Widodo Usai menyerahkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), menyerahkan 1.158 sertifikat kepada perwakilan warga. Pada kesempatan itu ia berjanji pemerintah akan terus mendorong percepatan dalam pengeluaran sertifikat dan menargetkan pada

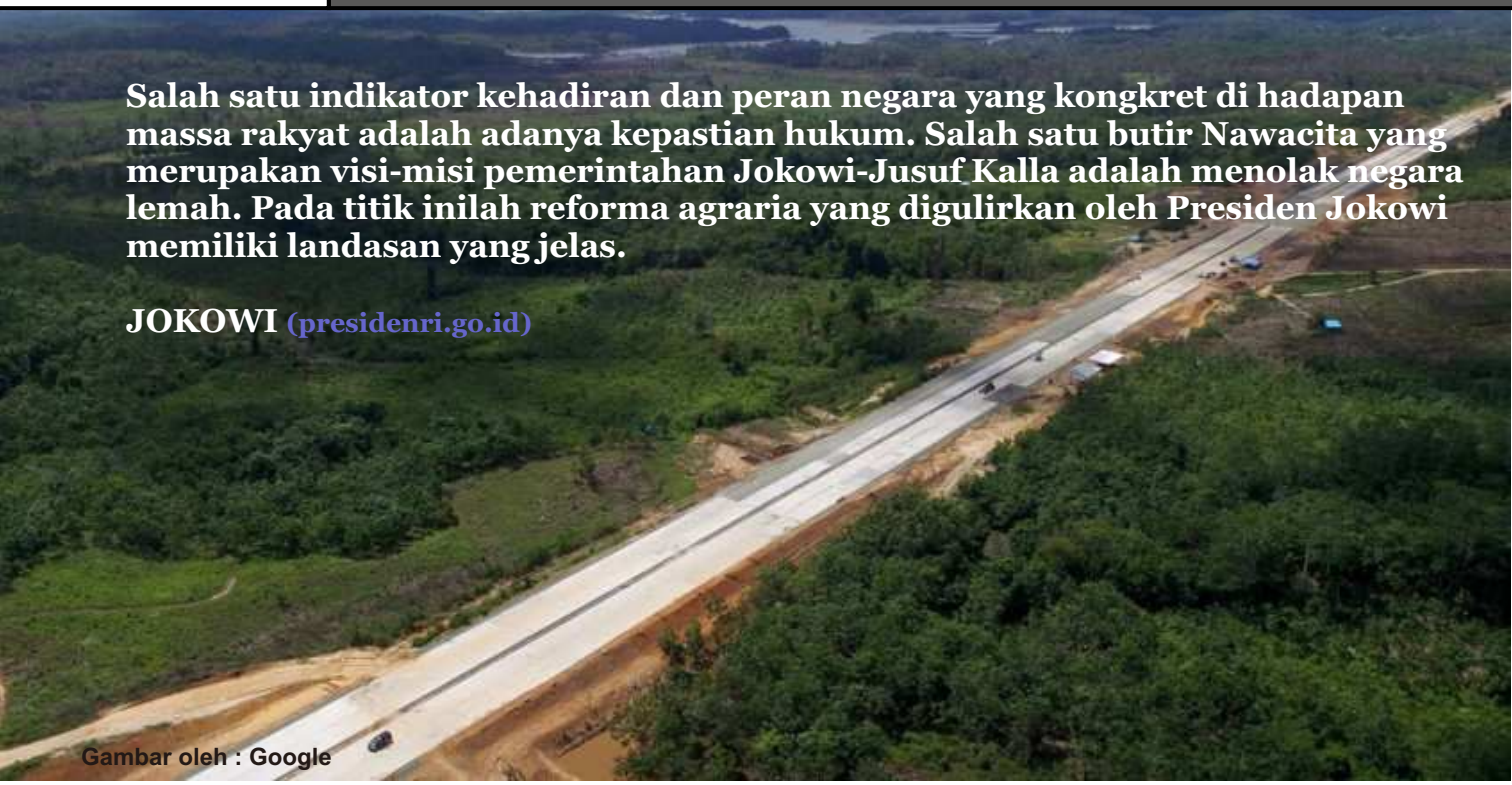

Salah satu indikator kehadiran dan peran negara yang kongkret di hadapan massa rakyat adalah adanya kepastian hukum. Salah satu butir Nawacita yang merupakan visi-misi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla adalah menolak negara lemah. Pada titik inilah reforma agraria yang digulirkan oleh Presiden Jokowi memiliki landasan yang jelas.

JOKOWI (presidenri.go.id)

Gambar oleh : Google

2017 ada 5 juta sertifikat yang dikeluarkan. Bahkan pada 2018 juga juga ditargetkan ada 7 juta sertifikat tanah dikeluarkan dan pada 2019 ada 9 juta sertifikat tanah untuk masyarakat Indonesia.

Dalam prakteknya, terdapat tiga persoalan pokok untuk melakukan reforma agraria ini.

Persoalan Pertama: adalah ketimpangan penguasaan tanah negara. Ketimpangan ini terjadi karena proses historis di masa lalu, di mana pelaku kekuatan ekonomi raksasa mendapatkan hak pengelolaan lahan dalam skala besar, sementara rakyat di kelas bawah makin kehilangan lahan mereka.Indikator yang paling nyata bagaimana ketimpangan ini terjadi adalah penguasaan hutan konsesi seluas 35,8 juta hektar oleh hanya 531 perusahaan pemegang konsesi hutan. Sebaliknya, terdapat lebih kurang 31.951 desa berada dalam status ketidakjelasan karena berada di kawasan hutan.Indikator yang lain adalah lebih dari separuh jumlah petani, yakni sebesar 56%, memiliki lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar.

Persoalan kedua: adalah timbulnya konflik-konflik agraria, yang dipicu oleh tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, di mana lahan-lahan negara yang diberi izin untuk dikelola, ternyata tidak seluruhnya merupakan lahan negara yang bebas kepemilikan.Sepanjang periode 2004-2015, tak kurang dari 1.772 konflik agraria terjadi akibat ketidakjelasan status tanah dan tumpang tindihnya peraturan di lapangan. Konflik ini setidak-tidaknya melibatkan sekitar 1,1 juta rakyat, dan luasan yang menjadi pokok konflik mencapai kurang lebih 6,9 juta hektar.

Soal ketiga: adalah timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan. Krisis ini diindikasikan dengan makin terdegradasinya kualitas lahan pertanian di pedesaan, makin menyempitnya lahan untuk pertanian yang dimiliki oleh para petani, dan makin berkurangnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor produksi pertanian, dan lebih banyak bertumpu pada pekerjaan di sektor jasa.Sebanyak 15,5 juta penerima beras untuk rakyat prasejahtera yang tinggal di pedesaan adalah salah satu indikator timbulnya krisis sosial di pedesaan. Sedangkan krisis ekologi di pedesaan salah satunya ditandai oleh keberadaan desa dengan status rawan air di 15.775 desa dan kekeringan di 1.235 desa.

Perintah Presiden Jokowi untuk melakukan percepatan reforma agraria, diharapkan dapat mengurai persoalan-persoalan pokok di atas. Adapun langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah pembuatan *one map policy* (kebijakan peta tunggal), legalisasi sertifikat aset lahan, redistribusi tanah bagi rakyat, dan pemanfaatan kawasan hutan bagi rakyat.****

(Sumber: BPN dan www.Presidenri.go.id)

KUNJUNGAN KERJA KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN KE ARAB SAUDI TANGGAL 23-30 APRIL 2017

"Setiap tamu Allah ke Tanah Suci Mekkah bagi Umat Islam wajib hukumnya melaksanakan Umroh terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja"

Pada 23-30 April 2017 Kedeputian Pengembangan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melaksanakan Kajian Luar Negeri (Kajilu) ke negara Arab Saudi, untuk mendapatkan informasi sekitar permasalahan pelaksanaan ibadah haji di Makkah dan Madinah.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap muslim yang berkunjung ke Kota Suci Makkah diwajibkan untuk melaksanakan Ibadah Umroh sekali seumur hidup. Perjalanan menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah ditempuh dalam waktu 9,5 Jam. Acara dilanjutkan dengan pelaksanaan Ibadah Umroh dengan mengambil Miqot di Bandara King Abdul Aziz.

Prosesi ibadah Umroh dengan melaksanakan thawaf sai dan tahalul. Selanjutnya Tim Kajilu melaksanakan rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) selama enam hari dengan mengunjungi tempat-tempat sebagai berikut : (1) Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI); (2) Kantor Urusan Haji Indonesia (KUHI); (3) Kantor Daerah Kerja (Daker) di Jeddah; (4) Taman Raudoh dan Makam Rasulullah SAW, Abu Bakar As Syidiq dan Umar Ibn Khotob; (5) Museum Al Qur'an dan perjuangan Islam di Madinah: dan (6) tempat bersejarah perjuangan Rasulullah SAW seperti Makam Baqi (makam para syuhada), Masjid Quba (Masjid yang pertama di bangun Rasulullah SAW), Masjid Kiblatain (masjid yang memiliki dua arah kiblat) dan ziarah ke Jabal Uhud.

Selama kegiatan Kunker, Tim Kajilu mengadakan berbagai pertemuan seperti pertemuan dengan Tim Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang juga sedang melakukan kunjungan di Jeddah. Selain itu, Tim Kajilu pun mengadakan pembicaraan dengan berbagai pihak pemangku kepentingan pelaksanaan ibadah haji Indonesia di Saudi Arabia untuk membahas sekitar permasalaah ibadah haji.

Selasa (25/04/2017) Tim Kajilu terbagi menjadi dua, karena adanya perubahan jadwal yang disebabkan, Wakil Kementerian Urusan Haji, Muhammad Bin Abdurrahman Al Baijawi Saudi Arabia di Madinah berkenan menerima rombongan Tim Kajilu lebih awal dari jadwal yang sudah ditetapkan. Sebagai antisipasi, maka Tim Kajilu dibagi menjadi dua yaitu Tim Pertama yang terdiri dari Sesjen Wantannas Letjen TNI Nugroho Widyotomo, Analis Kebijakan Bidang Pengembangan Militer dan Kepolisian Kedeputian Pengembangan Kolonel Sus. Drs. Sutarno, M.Si dengan didampingi Atase Pertahanan RI melaksanakan peninjauan lapangan terhadap fasilitas haji di Makkah dan Tim Kedua melaksanakan Kunker ke Kantor Wakil Menteri urusan haji di Madinah, selanjutnya Tim Kedua kembali ke Makkah untuk bergabung kembali dengan Tim Pertama.

Rabu (26/04/2017), Tim Kajilu Kedeputian Pengembangan melaksanakan Towaf Wada, yang merupakan rangkaian prosesi ibadah umroh sebelum meninggalkan kota Makkah. Setibanya di Madinah mereka menyempatkan melaksanakan Sholat Maghrib dan Isya di Masjid Nabawi. Kamis (27/04/2017), melaksanakan kegiatan ziarah ke Taman Raudoh dan Makam Rasulullah SAW, Abu Bakar As Syidiq dan Umar Ibn Khotob, serta melakukan rangkaian ibadah di Masjid Nabawi

Jumat (28/4/2017), Tim Kajilu melakukan kunjungan ke Museum Al Qur'an dan perjuangan Islam di Madinah. Sabtu (29/4/2017), melaksanakan ziarah ke tempat-tempat bersejarah perjuangan Rasulullah SAW seperti Makam Baqi (makam para syuhada), Masjid Quba (Masjid yang pertama di bangun Rasulullah SAW), Masjid Kiblatain (masjid yang memiliki dua arah kiblat) dan ziarah ke Jabal Uhud, dan Minggu (30/4/2017) Tim Kajilu kembali ke Jakarta.**** (Oleh : Kolonel Sus. Drs. H. Nurofik)

Ibu Fera Afanti Uloli

FORUM SILATURAHMI DHARMA WANITA PUSAT

Oleh: Fera Afanti Uloli

Rabu (26/4/2017), Dharma Wanita Pusat menyelenggarakan acara silaturahmi bersama anggota Dharma Wanita Persatuan Instansi Pemerintah Pusat (DWP IPP) dengan peserta yang berasal dari 12 anggota DWP IPP, yaitu DWP Kemenpan RB, DWP Kemensos, DWP Kemenpora, DWP Kemendagri, DWP Kemenperin, DWP Setjen Wantannas, DWP Setjen BPK, DWP Bakamla, DWP MPR RI, DWP Bulog, DWP BKKBN dan DWP LAN. Maksud dan tujuan kegiatan ini selain ajang silaturahmi juga untuk memperingati Hari Kartini yang jatuh pada 21 April serta menyukseskan program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).

Acara diawali dengan penyampaian kata sambutan yang salah satunya disampaikan oleh Ketua Umum DWP Ibu Wien Ritola Tasmaya, dilanjutkan dengan *Talkshow* bertemakan Pentingnya Membangun Keluarga Sehat oleh Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular-Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Lily Sriwahyuni Sulistyawati, MM dan Ekonomi Kuat, Keluarga Sejahtera oleh Sekretaris Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Ir. Agus Muharam, M.SP. Selain *Talkshow*, ada juga paduan suara membawakan lagu Ibu Kartini dan *medley* lagu-lagu daerah Indonesia dengan peserta seluruh anggota DWP Kelompok 1.

Acara dilanjutkan dengan Lomba Peragaan Busana ala Kartini yang diikuti oleh 12 anggota DWP IPP dengan 24 peserta lomba serta 3 orang juri yang berasal dari DWP Pusat. Lomba ini dimenangkan oleh peserta dari DWP Bakamla sebagai Juara Pertama, DWP Setjen Wantannas Juara Kedua dan DWP BPK Juara Ketiga.

Pertemuan Silaturahmi DWP IPP Kelompok 1 diakhiri dengan pembagian *door prize* kepada seluruh undangan yang hadir, dilanjutkan dengan bersantap siang dan bazaar yang diikuti oleh lebih dari 30 stand kuliner, *fashion*, aksesoris, *handycraft*, tas, dan lain-lain yang merupakan produk dalam negeri. Forum silaturahmi ini sangat bermanfaat sebagai alat untuk berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan, juga dalam mempererat silaturahmi, persahabatan dan kekeluargaan.****

Juara II Lomba Peragaan Busana Kartini, Ibu drg. Jeanne Oktav Perwakilan dari DWP Setjen Wantannas

INOVASI TEKNOLOGI REFINING
DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN ENERGI GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL

Oleh: dr. Riswandi, MM.

Kemandirian energi guna memperkokoh ketahanan nasional, merupakan pesan yang telah ditegaskan oleh Letjen TNI Nugroho Widyotomo selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Sesjen Wantannas) di hadapan para peserta Seminar Internasional *Asia Refining Technology Conference* (ARTC) 2017 di Ballroom Grand Hyatt, Jakarta. Seminar internasional ini diadakan oleh World Refining Association (WRA) yaitu sebuah lembaga yang mengkhususkan diri di bidang *refining technology* dan bermarkas di Fulham Inggris.

Pada acara ini WRA bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas), Universitas Pertahanan (Unhan) serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai *Co-Host.* Selain Sesjen Wantannas, hadir pada acara tersebut sebagai *keynote speech,* mantan Menteri Pertahanan sekaligus mantan Menteri ESDM yang juga Guru Besar pada Unhan, Purnomo Yusgiantoro.

Dalam paparannya, mantan Sekjen OPEC ini juga menyampaikan secara detail tentang kemudahan dan hambatan dalam berinvestasi dalam bidang pengolahan energi di Indonesia. Salah satu kegiatan pada acara ini yatiu diskusi panel yang melibatkan para pebisnis dari luar negeri seperti Philip Graham *Managing Director and Co-Head of Energi*, *Power and Utilities Citibank,* Luca Tonello *Deputy General Manager*, Anna Drobakha *Head of Project Finance Sumitomo Mitsui Banking Corporation*, Rudy Radjab *Departement Director Joint Projects Development in Refining and Commerce Rosneft* sekaligus *President Director* PT. Kreasindo.

Banyak hal yang dapat dipetik dalam forum internasional ini, seperti yang dikatakan oleh Sesjen Wantannas, bahwa Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan pasokan energi untuk menunjang pembangunan yang sedang gencar dilakukan. Oleh sebab itu, dibutuhkan inovasi dalam teknologi pengolahan (*refining technology*) berbasiskan minyak dan gas (migas) atau sumber bahan lain. Hal ini sangat menarik untuk dibahas, karena bukan hanya menyangkut aspek ekonomi saja, akan tetapi juga aspek-aspek lainnya yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara Indonesia.

Ada empat hal mendasar mengapa inovasi teknologi refining sangat penting dilakukan, yaitu : (1) Sumber energi makin menipis; (2) Peluang bagi bangsa Indonesia; (3) Dasar hukum yang menunjang; dan (4) Komitmen kuat pemerintah. Tantangan dibidang energi yang semakin nyata ada di depan mata adalah bahwa energi sebagai kebutuhan primer dalam segala aspek pembangunan semakin lama semakin menipis, hal

ini tidak saja dihadapi oleh Indonesia, namun juga hampir diseluruh belahan dunia. Indonesia sendiri sudah menjadi net importer minyak sejak 2004. Dengan kondisi seperti sekarang, Indonesia juga akan menjadi net importer gas pada 2024.

Menurut data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pada rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR tahun 2016 yang lalu, tingkat produksi dan konsumsi saat ini akan membuat Indonesia menjadi net importer energi pada 2026.

Berdasarkan data tersebut produksi minyak Indonesia per Mei 2016 adalah 832.000 barrel per hari (BPOD), setara sekitar 1 persen produksi minyak dunia. Adapun produksi harian gas mencapai 8.215 MMSCFD sehingga sejak 2003, produksi gas lebih besar daripada minyak. Dulu, cadangan minyak Indonesia sudah terbukti mencapai sekitar 27 miliar barrel. Per Desember 2015, masih ada cadangan sebanyak 3,6 miliar barrel, setara 0,2 persen cadangan minyak dunia. Sisa yang ada, menurut analisis yang dirujuk dari SKK Migas, hanya akan bertahan hingga 10 tahun kedepan untuk tingkat pemakaian yang tak berubah dari sekarang. Padahal, konsumsi migas Indonesia rata-rata meningkat sekitar 8 persen per tahun, dengan angka saat ini sekitar 1,6 juta barrel per hari.

Cadangan gas Indonesia pun tak lebih banyak daripada minyak. Merujuk data BP Statistical Review of World Energi pada 2015, saat ini Indonesia memiliki cadangan gas di kisaran 100 TSCF, setara 1,5 persen cadangan gas dunia. Meski demikian, diperkirakan Indonesia memang masih punya cadangan minyak sekitar 43,7 miliar barrel. Tantangannya, lokasi cadangan tersebut kebanyakan berada di kawasan laut dalam. Data-data tersebut merupakan tantangan bagi Indonesia.

Untuk memperpanjang kemampuan pasokan migas dari dalam negeri, eksplorasi sumber-sumber baru migas merupakan keharusan. Masalahnya, eksplorasi bukan pekerjaan mudah dan murah. Upaya ini butuh teknologi tinggi dan biaya mahal. Kehadiran investor menjadi kebutuhan tak terelakkan dari situasi ini. Dana investasi untuk migas sangat sedikit, dan Indonesia harus bersaing untuk mendapatkan alokasi dana investasi tersebut jika ingin meningkatkan produksi minyak dan gas buminya.

Guna mengatasi hal tersebut, setiap negara terlebih-lebih bangsa Indonesia harus berupaya melakukan inovasi untuk mengatasinya namun dalam prakteknya kita seringkali dihadapkan dengan permasalah teknologi. “Kita semua yang ada diruang ini menyadari bahwa inovasi teknologi merupakan salah satu modal pendorong kemajuan suatu negara,” Kata Letjen TNI Nugroho Widyotomo, dalam konferensi ARTC di hadapan

“Kita semua yang ada diruang ini menyadari bahwa inovasi teknologi merupakan salah satu modal pendorong kemajuan suatu negara,”
Letjen TNI Nugroho Widyotomo

ratusan ekpatriat yang merupakan perwakilan dari berbagai perusahaan baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Selanjutnya, menurut mantan Inspektur Jenderal Mabes TNI AD ini, kemajuan teknologi di bidang perminyakan, mulai dari hulu – hilir yang merupakan satu kesatuan yang merupakan industri “*high coast, high risk and high technology*”, terutama seperti teknologi eksplorasi – produksi migas di laut dalam, pengolahan/*refining* dan pengilangan migas.

Perkembangan saat ini, energi minyak bumi masih merupakan energi primadona dan energi vital diberbagai negara, termasuk di Indonesia, maka pengelolaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, untuk kemakmuran rakyat dan kepentingan negara.

Industri perminyakan pada pelaksanaannya agar menjadi perhatian khusus berbagai elemen dibidang hukum, lingkungan, sosial, ekonomi, politisasi dan keamanan. apabila pengelolaannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan, dikawatirkan adanya pengaruh kepentingan untuk keuntungan kelompok tertentu, sehingga kepentingan pembangunan nasional dapat terganggu. Oleh karena itu, Setjen Wantannas memandang bahwa seminar yang bernuansa teknologi ini menjadi penting bagi bangsa Indonesia untuk dicermati secara arif dan bijaksana. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap bangsa agar negara dapat terus menopang, membangun dan mensejahterakan rakyatnya.****

(Sumber : Kompas.com, Detik.com, Rundown acara ARTC 2017).

JEBAKAN TIKUS

Oleh: Sutarno

Alkisah...Hiduplah keluarga Petani suami istri di suatu pedesaan yang kesehariannya bercocok tanam. Dan sebagai sambilan dan hiburan juga memelihara ternak beberapa binatang seperti Ayam, Kambing dan Sapi atau ada juga yang menyebutnya Lembu..

Meskipun tidak diternakan...ada juga Tikus yang hidup di rumah pasangan Petani tersebut yang kerjaannya mencuri makanan dan tanaman.

Pada suatu hari, sepulang dari pasar. Petani tersebut membongkar barang belanjaan.

Ekh...sang Tikus mengintip, "Wah...bapak dan ibu Petani dari pasar, saya intip apa yang dibeli. Semoga makanan enak, kesenangan saya, nanti malam dicuri..."

Di luar yang diperkirakan Tikus, pak Tani membeli "Jebakan Tikus". Terperanjat dan panik, cemas, takut... sang Tikus. Seketika balik lari ke lubang.. Jantungnya berdegup..badanya gemetar.. darahnya mendidih.. kepala kliyengan... "Waduh bagaimana ini..ada jebakan di rumah ini...di rumah ini ada jebakan.. habislah..habislah.. Minta bantuan siapa..?"

Tikus lari menemui Ayam... "Ayam..Ayam.. bagaimana ini, di rumah ini ada jebakan.. ada jebakan di rumah ini." Dengan santai dan jumawanya si Ayam menjawab, bahwa jebakan tikus bukan urusan ayam, sambil melanjutkan makan siangnya.

Masih dengan paniknya, Tikus lari meninggalkan ayam menemui Kambing, "Kambing... kambing... di rumah ini ada jebakan tikus... ada jebakan lho di rumah ini, bagaimana ini..?" Yang diadui menjawab, "Tikus..tikus, ...saya ini kambing tidak ada urusan dengan jebakan tikus. Kan yang punya masalah kamu!"

Tidak mendapat apresiasi positif dari kambing, sang Tikus lari menemui Sapi, "Sapi..mohon bantuannya, bagaimana ini.. di rumah ini ada jebakan Tikus..?" Sapipun menjawab, "Waduh ... Tikus, mohon maaf ya. Rasanya saya tidak mempunyai masalah dengan jebakan tikus. Sapi tidak akan celaka karena jebakan tikus"

Sang Tikus tambah tertekan.. dalam kesendirian di rumah Petani.. terintimidasi hidupnya. Setengah putus asa, Tikus lari keluar rumah.. di temuinya Ular dan disampaikan apa yang dirasakannya. Rupanya Ular juga tidak tertarik dengan jebakan tikus di rumah Petani, apalagi memberi simpati dan empati serta solusi kepada tikus.

Tikus berhenti di pinggir parit kecil.. menenangkan diri .. setelah beberapa saat. Dalam hati mengatakan, "Ya..ya..ya.. Memang jebakan tikus bukan urusan siapa-siapa. Itu urusan saya. Dan .. hidup saya adalah hidup saya. Dan .. hidup saya berada di rumah Bapak Petani. Kalau memang mesti mati di jebakan, pasti Tuhan sudah merancang itu di takdir saya. Saya harus kembali ke rumah. Harus waspada, hidup normal, makan dan tidur seperti biasa." Tikus kembali ke persembunyiannya di rumah Petani.

Nah.. malamnya, terdengar suara "Prakkk..." Pak Tani terkejut oleh suara itu dan terbangun. Dalam hatinya, "Jebakan tikus dapet..!". Diperiksa bersama istrinya. Rupanya, yang nyangkut di jebakan bukan tikus, malah ular. Ekornya terjepit, badan dan kepalanya meliuk-liuk kesana kemari. Karena agak gelap, istri petani terlalu dekat dan..menjerit..."Aduhhh.." Ular mematuk kakinya. Secepatnya ular dipukul dengan potongan bambu. Ular.. mati!

Istri Petani sakit, dirawat ke Puskesmas. Ada tetangga yang memberi saran, agar demamnya kurang supaya dikasih sop ceker ayam. Karena sayang istri, Petani pulang dan langsunglah Ayam di potong untuk di jadikan sop. Ayam.. mati!

Sakitnya tidak mereda juga, entah tidak tahu dari mana ilmunya, ada tetangga sewaktu menjenguk, menyarankan yang sakit untuk dikasih ati Kambing supaya racun ular di tubuh istri petani segera hilang. Lagi-lagi, Pak tani pulang langsung ke kandang Kambing. Ditangkap dan dipotongnya Kambing untuk diambil hatinya agar istrinya cepat sembuh. Kambing.. celaka!

Barangkali memang nasib, istri Petani tidak kuat menahan racun ular, akhirnya meninggal. Rupanya keluarga petani tersebut orang baik, terlihat yang melayat banyak sekali. Ada yang dekat dan ada yang jauh. Karena tidak ada persiapan untuk menjamu para pelayat, Petani minta bantuan tetangga untuk memasak nasi yang banyak, dan memotong Sapi sebagai lauk paduan nasi. Sapi diiket lalu dipotong. Mati.

Habislah..Ular, Ayam, Kambing dan Sapi. Akhirnya yang masih hanya Tikus...Jebakan Tikus tersebut tidak digunakan lagi.

PESAN MORAL :

Apabila menemui seseorang yang dalam kesulitan, mohon tidak mengucapkan "Bukan urusan saya". Boleh jadi, disuatu saat hal serupa akan menimpa kita, atau boleh jadi juga hubunganya dengan belum kelihatan.****

Kopi, Kafein, dan Efek Sampingnya

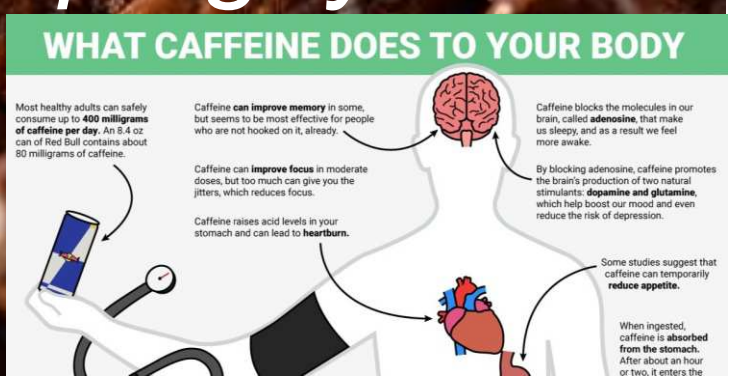

Oleh: Kurnia Yuniarti

Memiliki aktivitas dengan intensitas tinggi tidak dapat terelakkan bagi pekerja di kota besar seperti Jakarta. Bangun terlalu pagi untuk mempersiapkan materi rapat sampai pulang larut malam untuk menyelesaikan *deadline*. Tubuh yang lelah setelah beraktivitas seharian membutuhkan tambahan energi saat mengendarai kendaraan dan berhadapan dengan macet.

Siapa yang tidak mengenal kopi, teman setia beraktivitas hingga larut malam. Minuman ini terkenal sebagai pilihan utama untuk menghilangkan rasa kantuk. Rasanya yang pahit, memiliki aroma khas, dan warna hitam pekat menjadi ciri khas minuman ini. Kopi mengandung kafein yang memiliki efek farmakologis yang bermanfaat secara klinis, seperti menstimulasi susunan syaraf pusat, relaksasi otot polos (terutama otot polos bronkus), dan stimulasi otot jantung.

Cara kerja kafein adalah mengambil alih reseptor adinosin dalam sel saraf yang memicu produksi adrenalin dan menyebabkan peningkatan tekanan darah, sekresi, asam lambung, aktivitas otot, serta merangsang hati untuk melepaskan senyawa gula dalam aliran darah untuk menghasilkan energi ekstra. Tidak heran jika kita mengalami susah tidur setelah menenggak secangkir kopi atau minuman energi di malam hari.

Meskipun kafein aman dikonsumsi, zat tersebut dapat menimbulkan reaksi yang tidak dikehendaki jika dikonsumsi secara berlebihan seperti insomnia, rasa gelisah (neurosis), mengigau (delirium), denyut jantung tak beraturan (takikardia), denyut jantung prematur sebelum denyut jantung kembali normal (ekstrasistole), pernapasan meningkat, tremor otot, dan peningkatan produksi urin oleh ginjal (diuresis).

Selain kopi, kafein dapat ditemukan pada teh, cola, cokelat, dan minuman berenergi. Jumlah kandungan kafein pada jenis minuman atau produk makanan tentu berbeda-beda. Menurut aturan yang tercantum pada SNI 01-7152-2006, batas maksimum kafein yang diizinkan dalam makanan dan minuman adalah 150 mg/hari dan 50 g/sajian.

Menjamurnya kedai atau gerai kopi di ibukota dan beragam variasi kopi yang disajikan tentu menjadi daya tarik tersendiri. Namun perlu diingat, penikmat kopi perlu mengontrol jumlah konsumsi per harinya untuk menghindari ketergantungan pada minuman ini. Jadi, jangan takut mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein jika jumlahnya tidak berlebihan.**** (Sumber : BSN 2006)

MENDIDIK ANAK
DI ERA MODERN

Oleh: Asep Dani

Anak adalah permata berharga yang hadir di tengah-tengah kita. Ya, tidak semua orang bisa memiliki keturunan yang mampu meneruskan mimpi kita yang belum terwujud. Banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan seorang anak. Namun, di sisi lain masih ada pula orang yang begitu tega melenyapkan buah hatinya sendiri. Sungguh kejam dan biadab!

Nah, terkadang kita suka bingung cara mendidik anak ketika mereka sudah mulai tumbuh dewasa. Tidak tahu bagaimana cara mendidiknya, cara mengawasi pergaulannya, dan lain sebagainya. Akhirnya kita mencari tips dari orang-orang yang berpengalaman dalam mendidik anak.

Mendidik anak zaman dahulu dengan zaman sekarang itu sangat berbeda. Bahkan, cara perlakuannya pun sangat jauh sekali. Zaman 90-an ke bawah, cara mendidik anak cenderung lebih keras, tapi mampu membuat anak jadi lebih disiplin, sopan, bertanggung jawab, dan beretika. Apakah model pendidikan seperti itu jika diterapkan di zaman digital ini masih mempan? Bisa jadi anak malah kabur. Bahkan, tidak mau mengenal kita lagi sebagai orang tuanya.Sungguh prihatin, kalau kita sebagai orangtua sampai tidak dianggap lagi oleh anak sendiri. Namun, untuk mendidiknya maka kita musti mengetahui sifat, karakteristik, dan hal apa saja yang disukainya. Bukan malah kita melarang kesukaannya dan diganti dengan apa yang kita inginkan.

Anak itu bukan robot. Bukan pula seperti boneka yang bisa digerakkan semau kita. Anak juga butuh kebebasan. Namun, bukan berarti kita membiarkan mereka menjadi liar dan bebas semaunya. Seorang anak itu diibaratkan seperti padi. Kalau kita mengurus dan menjaganya dengan kasih sayang, maka nanti akan kita rasakan hasilnya. Namun, kalau kita membiarkan anak berprilaku semaunya, sementara kita asik dengan pekerjaan dan tidak pernah memperdulikannya, maka suatu saat akan membuat kita menyesal.

Selain pendidilan formal di sekolah, anak juga harus diberi pendidikan nonformal, misalnya pendidikan rohani. Tujuannya agar anak lebih mudah menjaga emosinya dan berpikir lebih baik.

Mendidik anak juga jangan sepenuhnya diberikan kepada guru yang juga memiliki keterbatasan. Tidak hanya anak kita yang didiknya. Oleh karena itu, sebaiknya kita musti menjadi tauladan, inspirasi, dan pahlawan buat anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita hanya memberikan mereka jalan dan menjaga mereka agar tetap berada di jalan yang benar. Ketika mereka salah kita bisa meluruskannya, tidak dibiarkan tersesat.

Memang cukup cukup sulit mendidik anak di era digital ini. Ya, seperti kita ketahui, anak berumur tiga tahun sudah bisa mengoprasikan *handhpone* orang tuanya. Tentu hal ini sudah di luar perkiraan kita, bukan? Lantas, apakah kita harus menjauhkan mereka dari teknologi? Kita tidak mungkin menahan derasnya laju teknologi. Biarkanlah anak kita memakainya. Tugas kita adalah membimbing dan mengawasinya, serta memberikan penjelasan kepada mereka, mana yang boleh dan tidak diperbolehkan. Kalau anak bisa paham, tentu kita pun bisa tenang.

Banyak kejadian dan kasus kehilangan anak, juga beberapa kasus pembunuhan yang diakibatkan penyalahgunaan media sosial. Hal itu terjadi karena rasa ingin tahu anak terhadap informasi, sehingga berani melanggar hal yang dilarang. Semestinya, selain diperkenalkan ke *gadget*, anak juga diperkenalkan ke buku. Mungkin hanya sedikit keluarga yang mendekatkan anak kepada buku. Ini mungkin terlihat aneh. Namun buku cukup efektif dalam mencegah anak melakukan hal negatif. Bagaimana caranya agar anak suka membaca? Anak itu daya pikirnya masih bersih, memorinya masih kosong. Kalau kita yang memulai memberi contoh membaca, maka anak pun akan mengikuti kita.

Percuma saja kita menyuruh anak membaca, tapi kita sendiri tidak melakukannya. Bahkan, hanya asyik berselancar di dunia maya. Oleh sebab itu kita harus bisa menjadi contoh bagi anak, bukan dari orang lain. Karena, anak akan mengikuti apa yang telah kita lakukan, bukan apa yang orang lain lakukan.****

FAKTA MENARIK TENTANG SOSOK WR SUPRATMAN

Oleh : Desi

Anak Laki-Laki Satu-Satunya di Keluarga

Wage Rudolf Supratman atau yang lebih kita kenal dengan nama WR Supratman adalah putra pasangan Djoemeno Senen dan Siti Senen. Djoemeno Senen pernah bergabung dengan tentara KNIL (kesatuan tentara Hindia Belanda). Wage ini anak kelima mereka, tapi satu-satunya yang laki-laki. Semua kakak adik Wage berjenis kelamin perempuan.

Asal Usul Sisipan Nama Belanda

Kedua orangtua WR Supratman kan orang Jawa, tapi kenapa mereka memberikan putranya itu nama tengah Rudolf yang terasa agak kebarat-baratan? Untuk gaya-gayaan kah?

Jangan salah sangka dulu. Nama Rudolf itu punya tujuan khusus. Sesudah ibu Wage meninggal dunia, Wage diboyong oleh keluarga kakaknya ke Makassar. Nama Rudolf itu diberikan oleh abang iparnya, W.M van Eldik, sebagai siasat supaya Wage bisa sekolah di Europese Lagere School (ELS). Dengan memakai nama seperti itu, Wage bisa bersekolah di tempat yang hanya menerima orang-orang Eropa dan Belanda tersebut.

Jadi Anak Band

Kemampuan WR Supratman memainkan biola juga adalah hasil berguru pada kakak iparnya tersebut. Van Eldik memang mahir memainkan alat musik seperti biola dan gitar. Sewaktu Wage berusia 17 tahun, sekitar tahun 1920, van Eldik malahan mengajaknya untuk main musik bareng. Mereka membentuk band bernama Black & White Jazz Band. Kelompok musik ini sering tampil di pesta-pesta di Makassar.

Membuat Indonesia Raya Tergugah Artikel Majalah

Indonesianis yang beberapa waktu lalu telah berpulang, Benedict Anderson, dalam bukunya Imagined Communities menyebutkan bahwa nasionalisme perjuangan Indonesia di masa pergerakan terbangun lewat berita-berita yang dimuat di media cetak. Pengalaman WR Supratman ini sepertinya adalah salah satu buktinya.

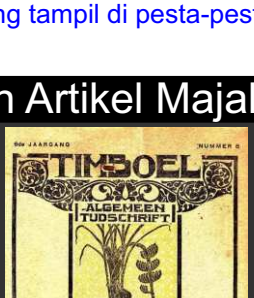

Wage terpicu untuk membuat lagu Indonesia Raya setelah membaca salah satu artikel yang dimuat di surat kabar Fajar Asia terbitan Jakarta. Artikel tersebut aslinya dimuat di majalah Timboel terbitan Solo.

CUMI BAKAR
SAMBAL MANGGA

Gambar oleh : Google

Oleh : Ibu Zainuddin

BAHAN-BAHAN
500 gram cumi bangka
200 gram tahu putih
2 butir telur
3 Lembar daun bawang dan selederi

BUMBU BARBEQUE
6 siung bawang merah
4 siung bawang putih
1 sdt lada halus
5 cabe merah besar
Haluskan

BUMBU SAMBAL
10 cabe rawit merah
5 siung bawang merah
3 siung bawang putih
2 buah tomat sedang
1 sdt terasi bakar
½ buah mangga muda (diserut)

CARA MEMASAK
1. Bersihkan cumi (cuci bersih)
2. Campurkan bumbu halus, potongan daun bawang seledri dengan tahu yang dihaluskan dan telur, tambahkan garam secukupnya
3. Isi cumi dengan campuran diatas. Lalu di tutup dengan biting atau tusuk gigi
4. Bakar cumi isi tersebut dengan sesekali dioleskan bumbu barbeque sampai matang
5. Haluskan bawang putih, cabe rawit merah, dan tomat serta terasi bakar
6. Iris bawang merah lalu tumis sampai harum, kemudian masukan bumbu yang sudah dihaluskan
7. Masak sampai mendidih dan kadar airnya 0%, lalu beri garam dan gula
8. Setelah matang campurkan dengan mangga muda yang sudah diserut
9. Siramkan diatas cumi yang sudah dibakar tadi
10. Cumi bakar sambal mangga siap disantap

DWP Setjen Wantannas Meraih Juara II dalam Lomba Peragaan Busana Kartini, Rabu (26/4/2017)

Sesjen Wantannas dalam Kegiatan Semiloka Bersama Universitas Palangka Raya tanggal 18-21 April 2017

Audiensi Penjajakan Kerjasama Antara Wantannas dengan BPS, Kamis (06/4/2017)

Pelantikan Pejabat Eselon II dan III di Lingkungan Setjen Wantannas, Jumat (07/4/2017)

Sesjen Wantannas dan Karo PSP Dalam Kegiatan Jam Pimpinan, Senin (03/4/2017)

Karo PSP bersama Tim BPK, Senin (03/4/2017)

Majalah CATRA menerima artikel dan berita tentang suatu kegiatan atau apa saja. Panjang tulisan maksimal 500 kata, jenis huruf Arial, ukuran huruf 12, ukuran spasi 1,5 dan jenis kertas A4. Artikel dikirim dalam bentuk *hard* dan *soft copy* dengan format *MS. Word* ke alamat redaksi Majalah CATRA. Redaksi berhak menyunting tulisan tersebut tanpa mengurangi maksud dari isi tulisan. Artikel yang dimuat akan mendapat imbalan. Informasi lebih lanjut dapat langsung menghubungi Bagian Humas Biro Persidangan dan Humas Setjen Wantannas, Jalan Medan Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110.

KUNJUNGAN KERJA
KEDEPUTIAN PENGEMBANGAN SETJEN WANTANNAS

KE KONSULAT JENDERAL URUSAN HAJI INDONESIA
DI JEDDAH, ARAB SAUDI
TANGGAL 23-30 APRIL 2017